

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia memiliki potensi yang besar dalam menghadapi era *Asean Economic Community*. Era AEC memaksa bangsa Indonesia untuk lebih inovatif sehingga dapat tetap bertahan dan semakin maju untuk menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Daya Saing bangsa harus terus ditingkatkan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi mandiri (Ratwianingsih, 2018). Sektor bisnis merupakan kekuatan utama di balik ekspansi ekonomi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pengembangan ekonomi nasional, UMKM menjadi tulang punggung system ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Pengembangan UMKM akan memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat struktural, yaitu meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional (Kurniawan dalam Utari, 2014).

Pada era globalisasi saat ini memberikan dampak pesatnya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mengakibatkan perubahan disegala bidang, salah satunya yaitu bidang ekonomi. Berbagai macam jenis usaha yang dijalani oleh setiap orang untuk mendapatkan penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup baik disektor formal maupun informal. Tingginya pertumbuhan penduduk di perkotaan menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan di bidang formal. Hal ini lah yang menyebabkan kegiatan sektor informal untuk di jadikan sebagai alternative lahan mata pencarian bagi masyarakat mulai dari bertani, bekerja kantoran, berdagang, memanfaatkan sumber daya alam dan lain sebagainya (Lestario, 2017).

*Liquefied Petroleum Gas* (LPG) atau sering disebut Elpiji adalah campuran dari berbagai unsur *hidrokarbon* yang berasal dari gas alam yang diperoleh dari kilang-kilang gas atau hasil pengolahan minyak bumi. Dengan menambah tekanan

dan menurunkan suhunya, maka gas berubah menjadi cair. Elpiji adalah bahan bakar yang umum di beberapa sektor seperti rumah tangga, industri dan transportasi (J.Morganti dalam Kurniaty, 2016).

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral salah satu cara untuk mengurangi subsidi minyak tanah guna menghemat anggaran negara adalah dengan mengurangi penggunaan minyak tanah dengan cara menghemat bahan bakar alternatif seperti LPG untuk menggantikan minyak tanah. Sebelum dikonversi, konsumsi minyak tanah sebesar 12 juta liter per tahun. Saat itu, sekitar Rp. 25 triliun diberikan dalam bentuk subsidi. Dari jumlah volume sebesar itu profil pengguna minyak tanah adalah sekitar 10% golongan sangat miskin, 10% golongan miskin, 50% golongan menengah, dan 20% golongan mampu yang menggunakan minyak tanah. Penyaluran subsidi minyak tanah jelas tidak tepat sasaran, berdasarkan profil pengguna. Minyak tanah bersubsidi masih banyak digunakan oleh keluarga menengah ke atas dengan berbagai macam alasan.

Pada tahun 2007 pemerintah dan Pertamina mengalihkan fungsi minyak tanah ke elpiji 3 kg. Alasan peralihan dari minyak tanah ke elpiji adalah karena minyak tanah semakin mahal, sulit didapat, dan kelangkaan di mana-mana. Masalah tersebut membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengganti kompor minyak dengan tabung elpiji 3 kg dan kompor gas secara gratis, yang memungkinkan orang untuk beralih tanpa biaya (Pahlefi, 2017). Dari pelaksanaannya pada tahun 2007 hingga akhir tahun 2010, sebanyak 44.675.000 kartu perdana telah didistribusikan ke seluruh Indonesia atau 100% dari target. Masyarakat sasaran mengkonsumsi total 3.793.000 metrik ton (MT) LPG. Penarikan minyak tanah sekaligus mencapai 11.317.000 KL (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2010). Keunggulan elpiji 3 kg dari segi ekonomi memang tidak bisa dipungkiri, namun kebijakan konversi ini menimbulkan banyak pertanyaan sekaligus jawaban di kalangan masyarakat luas.

Saat ini elpiji menjadi perhatian banyak masyarakat karena merupakan produk yang sangat dibutuhkan oleh konsumen, permintaannya meningkat cukup drastis sehingga harga terus melambung tinggi, dan pasokannya seringkali dibatasi oleh kelangkaan, seperti di beberapa daerah khususnya untuk produk

elpiji 3 kg. Selain konsumen minyak tanah beralih ke elpiji, konsumsi juga beralih dari elpiji satu ke elpiji lainnya. Kenaikan elpiji 12 kg mendorong konsumen untuk beralih ke elpiji 3 kg, yang sebenarnya merupakan komoditas khusus untuk kelas bawah dan menengah. Pergeseran konsumsi masyarakat terhadap elpiji 3 kg mengakibatkan kebutuhan akan elpiji 3 kg menjadi besar, sehingga permintaan meningkat dan menyebabkan kelangkaan elpiji bersubsidi.

Tujuan dari subsidi pemerintah Indonesia adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Salah satu komoditas yang diberikan subsidi harga oleh pemerintah yaitu elpiji 3 kg. Tetapi, di Indonesia banyak masyarakat yang berpenghasilan tinggi masih mengandalkan subsidi pemerintah. Hal ini menciptakan kelangkaan di daerah padat penduduk, seperti kota-kota besar. Penggunaan gas elpiji sendiri bagi rumah tangga menengah, warung kopi, dan PNS/BUMD/BUMN diwajibkan menggunakan gas elpiji 12 kg atau *bright gas*. Untuk rumah makan menengah, kedai kopi, hotel maupun restoran wajib menggunakan gas elpiji 50 kg/buk. Namun kenyataannya masih terdapat rumah tangga menengah dan kedai kopi, serta restoran dengan omset besar yang masih menggunakan gas elpiji 3 kg. Hal inilah yang sering menjadi penyebab kelangkaan elpiji 3kg di beberapa daerah. Kelangkaan gas elpiji 3 kg yang terlihat sangat wajar karena digunakan oleh semua pihak yang merasa berhak untuk menggunakannya (Wulansari, 2018).

Dengan Pertamina sebagai agen pengadaan dan pendistribusian gas elpiji 3 kg, pemerintah telah menyiapkan sistem yang dapat menjangkau semua kalangan. Untuk pendistribusian gas LPG, Pertamina telah menyiapkan sistem distribusi yang dimulai dari SPBE, perusahaan pengisian LPG, dan berlanjut melalui agen dan sub agen atau pangkalan distributor besar. Pertamina melalui pemerintah juga menetapkan harga yang harus diterima masyarakat.

Pertamina menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2007 tentang Harga Jual Eceran Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kg untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro. Yang mengatur seluruh rantai distribusi, dari agen ke pelanggan akhir. Subsidi Jambi untuk tabung gas cair (LPG) 3 kg ditentukan

sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 241 Tahun 2021 terlampir, yang menyatakan:

**Tabel 1.1 Harga Eceran Tertinggi LPG Subsidi Tabung 3 Kg di Provinsi Jambi**

| No | Kabupaten/Kota                                            | Harga di SPBE (Rupiah) | Harga di Agen (Rupiah) | HET di Pangkalan (Rupiah) |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1  | Kota Jambi, Kab. Bungo, Kab. Merangin dan Kab. Batanghari | 11.550                 | 14.200                 | 17.000                    |
| 2  | Kab. Muaro Jambi, Kab. Tebo, dan Kab. Sarolangun          | 11.550                 | 15.200                 | 18.000                    |
| 3  | Kab. Tanjabbar dan Kab. Tanjabtim                         | 11.550                 | 16.200                 | 19.000                    |
| 4  | Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh                        | 11.550                 | 17.200                 | 20.000                    |

Sumber : Surat Keputusan Gubernur Jambi 2021

Dari tabel 1.1 menerangkan bahwa harga tebus agen ke SPBE setiap kabupaten/kota sebesar Rp11.550. Kemudian untuk harga tebus pangkalan ke agen di Kota Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Batanghari sebesar Rp14.200, dan harga tebus pangkalan ke agen di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Sarolangun sebesar Rp15.200, harga tebus pangkalan ke agen di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp16.200, dan harga tebus pangkalan ke agen di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sebesar Rp17.200.

Harga Eceran Tinggi di setiap wilayah di Provinsi Jambi memiliki perbedaan tergantung Jarak dari Agen ke SPPBE. Untuk wilayah Kota Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Batanghari jarak radiusnya 0-60 Km dari SPPBE sehingga HET nya sebesar Rp17.000. Untuk Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun memiliki HET sebesar Rp18.000 dikarenakan jarak radius dari agen ke SPPBE sejauh 61-120 km. Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki HET sebesar Rp19.000 dikarenakan jarak radius dari agen ke SPPBE sejauh 121-180 km. Sedangkan untuk Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai penuh memiliki HET sebesar Rp20.000 dikarenakan jarak radius dari agen ke SPPBE sejauh 181-240 km. Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa semakin

jauh jarak pengisian gas ke SPPBE maka semakin mahal pula Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan karena besarnya biaya operasional yang dikeluarkan.

Meskipun telah terdapat penetapan harga eceran tertinggi tidak menutup kemungkinan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan penetapan harga HET, hal ini disebabkan karena panjang saluran distribusi dan lokasi pangkalan yang tidak merata agar lebih dekat dengan konsumen. Karena bisnis yang mendasarinya relatif menguntungkan, maka muncul pengecer informal yang menyebabkan rantai distribusi yang lebih panjang. Biaya operasional juga mengakibatkan ketidaksesuaian antara harga jual gas dari tingkat pangkalan dengan HET saat ini. Gas elpiji 3 kg dianggap sudah menjadi kebutuhan pokok bagi rumah tangga dan UMKM, meskipun harga elpiji yang tinggi, masyarakat tetap akan membeli dengan harga tersebut. Jumlah penduduk Jambi pada tahun 2021 sebanyak 606.200 jiwa. Masyarakat akan membutuhkan elpiji dalam jumlah yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Banyak agen minyak tanah yang berubah menjadi agen elpiji 3 kg selama proses konversi. SPBU Elpiji, agen, dan pangkalan merupakan bagian dari jaringan distribusi elpiji 3 kg.

Menurut Peraturan Daerah Kota Jambi No.10 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Distribusi Liquified Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Pasal 5 mengenai Sub penyalur atau pangkalan gas LPG 3 Kg Bersubsidi :

1. Sub Penyalur dalam menyalurkan LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi adalah sub penyalur resmi yang sesuai dengan persyaratan sub Penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi yang direkomendasikan oleh Direktur Jenderal dan wajib memiliki Surat Keterangan Penyalur dari Direktur Jenderal.
2. Sub Penyalur wajib mendistribusikan LPG tabung 3 (tiga) Kg bersubsidi kepada Konsumen Pengguna di wilayah Sub Penyalur hasil penataan yang telah ditetapkan.
3. Penataan wilayah sub penyaluran diatur oleh Pemerintah Dearah bersama badan usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota

4. Penataan wilayah Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada besarnya volume sub penyaluran dan luas wilayah sub penyaluran.
5. Hasil penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa daftar keanggotaan Sub Penyalur pada Penyalur LPG tabung 3 (tiga) Kg Bersubsidi pada wilayah yang telah ditetapkan.
6. Penyalur dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan Sub Penyalur kepada Badan Usaha dengan tembusan Direktur Jenderal dan Walikota.
7. Sub Penyalur menjual LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Walikota.
8. Sub Penyalur berhak mendapatkan kepastian kuota dari Penyalur sesuai dengan kuota yang diberikan kepada penyalur.
9. Sub Penyalur dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
10. Penetapan sebagai Sub Penyalur yang telah diterbitkan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
11. Sub Penyalur dilarang melakukan transaksi dengan konsumen pengguna yang tidak dapat menunjukkan Kartu Kendali.
12. Sub Penyalur dilarang melakukan manipulasi terhadap pencatatan penerimaan dan penyaluran LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi pada buku catatan.
13. Sub Penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi melaporkan setiap bulan sekali kepada Penyalur LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi dan Camat, Kelurahan/RT setempat mengenai realisasi volume Penyaluran LPG tabung 3 (tiga) kg bersubsidi kepada masyarakat dan disertai Tanda Bukti Penerimaan dan penyaluran.

Pada tahun 2020 berdasarkan Surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1568/15/DJM/2020 bahwa Kuota Gas LPG 3 Kilogram di Kota Jambi dalam 1 Tahun sebanyak 16.205 Metrik per ton, apabila di Konversikan dalam bentuk Tabung Gas LPG 3 Kilogram menjadi 5.401.567

Tabung Gas. Penyaluran tersebut dilaksanakan melalui 9 Agen Penyalur dan 433 Pangkalan untuk seluruh Kota Jambi berdasarkan data yang tercatat resmi milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi. Pangkalan adalah Sub penyalur elpiji 3 kg bersubsidi yang berbentuk koperasi atau badan usaha perorangan yang ditunjuk oleh badan usaha atas usul pemasok untuk melakukan kegiatan pendistribusian. Berikut adalah data pangkalan gas elpiji 3 kg di Kota Jambi:

**Tabel 1.2 Jumlah Pangkalan Gas Elpiji di Kota Jambi**

| No           | Kecamatan     | Jumlah Pangkalan<br>( Unit ) |
|--------------|---------------|------------------------------|
| 1            | Alam Barajo   | 50                           |
| 2            | Danau Sipin   | 36                           |
| 3            | Danau Teluk   | 17                           |
| 4            | Jambi Selatan | 47                           |
| 5            | Jambi Timur   | 63                           |
| 6            | Jelutung      | 40                           |
| 7            | Kota Baru     | 45                           |
| 8            | Paal Merah    | 87                           |
| 9            | Pasar Jambi   | 7                            |
| 10           | Pelayangan    | 11                           |
| 11           | Telanaipura   | 30                           |
| <b>TOTAL</b> |               | <b>433</b>                   |

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi 2021

Dari tabel 1.2 bisa dilihat bahwa di Kecamatan Alam barajo sebanyak 50 unit pangkalan, di Kecamatan Danau sipin sebanyak 36 unit pangkalan, di Kecamatan Danau teluk sebanyak 17 unit pangkalan, di Kecamatan Jambi Selatan sebanyak 47 unit pangkalan, di Kecamatan Jambi timur sebanyak 63 unit pangkalan, di Kecamatan Jelutung sebanyak 40 unit pangkalan, di Kecamatan Kota baru sebanyak 45 unit pangkalan, di Kecamatan Paal merah sebanyak 87 unit pangkalan, di Kecamatan Pasar jambi sebanyak 7 unit pangkalan, di Kecamatan Pelayangan sebanyak 11 unit pangkalan dan di Kecamatan Telanaipura sebanyak 30 unit pangkalan. Serta total keseluruhan pangkalan yang ada di Kota Jambi yaitu terdapat 433 unit pangkalan.

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui banyaknya usaha pangkalan gas elpiji yang ada di Kota Jambi menandakan bahwa usaha ini termasuk salah satu usaha yang menjanjikan. Pendapatan para pemilik usaha akan cukup besar bila mengolah pangkalannya dengan baik dan keuntungan yang diperoleh juga lumayan. Maka dari itu pendapatan usaha pangkalan gas elpiji dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti modal usaha, yang termasuk modal usaha yaitu uang yang digunakan untuk berdagang menambah kekayaan, atau dalam hal ini digunakan untuk membeli tabung gas, karena tabung yang mereka miliki tidak sesuai dengan kuota gas yang mereka dapat ada yang kekurangan dan ada juga yang kelebihan tabung gas. Selain itu faktor lainnya yaitu kuota gas, masih banyak pangkalan yang ingin menambah kuota gas perbulannya karena sering mengalami kekurangan. Faktor lainnya yaitu lama usaha dan jumlah pengecer yang bekerja sama dengan pangkalan dalam mendistribusikan gas elpiji 3 kg.

Penelitian ini dilakukan di Kota Jambi dikarenakan masyarakat membutuhkan gas elpiji 3kg dan banyak masyarakat yang tertarik untuk menjual elpiji 3 kg. Selain itu banyak distribusi gas yang diperdagangkan oleh pangkalan dan banyak masyarakat serta usaha kecil yang membutuhkan elpiji 3kg untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang juga mendorong bisnis para pengusaha kecil dan mikro. Hal ini membuat penulis ingin mengetahui pendapatan dari pangkalan gas elpiji. Dengan demikian hal hal tersebut yang menjadi latar belakang penulis untuk mengangkat judul **“Analisis Pendapatan Usaha Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg Di Kota Jambi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, masalah utama penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi usaha pangkalan gas elpiji 3 kg di Kota Jambi ?
2. Bagaimana pengaruh modal usaha, kuota gas, lama usaha dan jumlah pengecer terhadap pendapatan usaha pangkalan gas elpiji 3 kg di Kota Jambi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setelah perumusan masalah, tujuannya adalah :

1. Untuk mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi usaha pangkalan gas elpiji 3 kg di Kota Jambi.
2. Untuk mengukur dan menganalisis Modal usaha, Kuota, lama usaha dan jumlah pengecer terhadap pendapatan usaha pangkalan gas elpiji di Kota Jambi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepentingan akademis, untuk pengembangan ilmu ekonomi khususnya ekonomi mikro dan sebagai bahan referensi atau masukan bagi peneliti lain yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. Kepentingan praktis, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak seperti Pertamina, agen, pangkalan dan bidang usaha lainnya di Kota Jambi.